

Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Jennifer Carolina Golung, R. Budi Hendaris

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani
jennifercarolina_21p080@ak.unjani.ac.id, budihendaris@gmail.com

ABSTRACT

The quality of local government financial reports is a key indicator of the accountability of public financial management. Although the Karawang Regency Government routinely receives an Unqualified Opinion (WTP), this opinion is often accompanied by an Explanatory Paragraph (WTP-DPP), which indicates significant audit findings from the Supreme Audit Agency (BPK). These audit findings indicate that there are still inconsistencies in good governance practices and weaknesses in understanding Government Accounting Standards (SAP). This study aims to analyse the influence of the implementation of good governance and understanding of Government Accounting Standards (SAP) on the quality of financial reports in the Karawang Regency Government. The research method used is quantitative research. The data was collected through a questionnaire. The target population consists of 22 Local Government Agencies (OPD) with a sample size of 44 respondents. The sampling approach used is saturated sampling. Data analysis was conducted using IBM SPSS version 27. The results of the analysis indicate that the implementation of good governance has a significant partial effect on the quality of financial reports. Similarly, understanding of Government Accounting Standards has a significant partial effect on the quality of financial reports. Simultaneously, these two variables contribute 62.8% to the quality of financial statements, while the remaining 37.2% is influenced by other factors not explained in this study.

Keywords: *Good Governance, Government Accounting Standards, the Quality of Financial Statement, Local Government.*

ABSTRAK

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi indikator kunci yang menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang secara rutin memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun opini tersebut kerap disertai dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), yang mengindikasikan adanya temuan audit signifikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan audit ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam praktik *good governance* serta kelemahan dalam pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini dengan tujuan dalam menganalisis pengaruh penerapan *good governance* dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Metode penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Dari sisi data yang dilakukan dengan via kuesioner. Populasi yang dituju dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sampel yang berjumlah 44 responden Pendekatan penarikan sampel yang dipakai ialah sampling jenuh. Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan IBM

SPSS versi 27. Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 62,8% terhadap kualitas laporan keuangan, sementara sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam studi ini.

Kata kunci: *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan menjadi indikator krusial dalam mengukur tingkat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah (Dzaky & Putra, 2020). Pembuatan laporan keuangan sektor publik mengacu pada prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya keuangan negara dan daerah (Ikriyati & Aprila, 2019). Standar Akuntansi Pemerintahan menyediakan kerangka konseptual dan terstandarisasi guna menghasilkan laporan finansial yang informatif, andal, dan sanggup diterima secara hukum maupun publik (Hartikayanti, 2020). Lebih jauh, laporan keuangan juga memainkan peran strategis dalam memacu terealisasinya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Penerapan desentralisasi fiskal dan akuntansi berbasis akrual di Indonesia telah meningkatkan perhatian pada mutu laporan keuangan pemerintah, terutama dalam hal keterbukaan dan integritas. Kendati regulasi dan pedoman teknis telah tersedia secara komprehensif, tantangan substantif dalam mencapai kualitas pelaporan keuangan yang optimal masih menjadi perhatian utama (Rahmadani & Zulaika, 2023).

Kualitas laporan keuangan merujuk pada tingkat pencapaian karakteristik normatif yang seharusnya dimiliki oleh informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuan penyajiannya secara optimal. Mengacu pada (Peraturan Pemerintah No. 71, 2010), kualitas laporan keuangan ditentukan oleh empat spesifik utama, yaitu (1) Relevan, yang berarti informasi yang disajikan menyandang daya guna dalam mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. (2) Dapat dipahami, yang mengharuskan laporan keuangan disusun secara sistematis, jelas, dan tidak berbelit agar dapat dimengerti oleh pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk non-akuntan. (3) Dapat dibandingkan, yang menekankan bahwa informasi dalam laporan harus dibandingkan lintas waktu maupun antar entitas, guna memfasilitasi penilaian terhadap konsistensi kinerja dan perubahan kondisi keuangan. (4) Andal, yaitu keakuratan penyajian informasi yang bebas dari kekeliruan material dan mencerminkan kondisi sebenarnya melalui proses verifikasi yang memadai.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kemampuan dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif menjadi determinan penting dalam pencapaian kinerja birokrasi yang tepat. Informasi finansial pemerintah daerah (LKPD) yang

disusun secara tepat tidak hanya menjadi representasi kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan implementasi landasan *good governance*, seperti keterbukaan dan transparansi (Purwanti, 2022). Laporan keuangan yang bermutu mampu meningkatkan citra publik terhadap kompetensi pemerintah daerah dan secara implisit mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Sebagai ilustrasi, tabel berikut menyajikan tren opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 1. Perkembangan Opini BPK atas LKPD di Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Opini Audit
1	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2022	Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)
5	2023	Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)

Sumber: jabar.bpk.go.id

Sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selaku wujud evaluasi mengenai kelayakan pemaparan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi yang berlaku. Temuan audit yang dikeluarkan oleh BPK tidak hanya menjadi indikator atas kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merefleksikan tahapan yakni keandalan, relevansi, dan transparansi dari informasi keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah daerah setempat (Hermawan, 2022). Kaitan antara temuan audit BPK dan kualitas laporan keuangan sangat erat, sebab opini tersebut ialah hasil akhir dari proses pemeriksaan menyeluruh atas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan penerapan standar akuntansi pemerintahan (Syafaah & Baroroh, 2023). Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disertai dengan tambahan paragraf penjas (WTP-DPP).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun laporan finansial telah ditata selaras dengan ketentuan yang berlaku, kualitasnya belum sepenuhnya stabil tiap tahun. Hal ini tampak dari penurunan audit pada tahun 2022 dan 2023, di mana sebelumnya pada periode 2019 hingga 2021, Pemerintah Kabupaten Karawang berhasil memperoleh opini WTP secara berturut-turut. Menurut salah seorang Bagian Keuangan di BPKAD, “penurunan opini ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek tertentu, seperti pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, atau pencatatan aset dan kewajiban yang berdampak pada temuan material oleh auditor”. Dengan demikian, meskipun laporan keuangan secara umum telah

memenuhi persyaratan normatif, masih dibutuhkan perbaikan pada beberapa aspek substansial untuk memastikan laporan keuangan benar-benar mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Temuan ini sekaligus memperkuat urgensi pembaharuan berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang memiliki kegunaan untuk mendorong tata kelola yang lebih baik di masa mendatang (Purwanti, 2022).

Dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berkembang dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi secara proaktif. Penguasaan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan oleh aparatur daerah menjadi krusial dalam upaya mengembangkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Purwanti, 2022). Namun demikian, keterbatasan kapabilitas tenaga kerja masih menjadikan salah satu hambatan utama yang intens terhadap implementasi pelaporan yang optimal. Di sisi lain, pendayagunaan teknologi digital dalam sistem pengendalian anggaran daerah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerapan aturan *good governance*, khususnya dalam hal peningkatan keterbukaan informasi juga efektivitas mekanisme pengawasan. (Hendaris & Romli, 2021) menyatakan bahwa digitalisasi sistem keuangan publik turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Karawang perlu terus mengembangkan kapasitas aparatur secara bertahap agar mampu membuahkan laporan finansial yang bermutu dan sepadan dengan kriteria yang berlaku.

Telaah sebelumnya yang dilakukan oleh (Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, 2024), mengemukakan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* secara signifikan andil pada pengoptimalan mutu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Tetapi, sebagaimana yang diungkapkan (Advia et al., 2023), rendahnya mutu laporan anggaran daerah lebih dipengaruhi oleh efektivitas penerapan tata Kelola pemerintahan, bukan semata-mata oleh regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai salah satunya instrumen urgen untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. (Mukaromah & Ari, 2021) turut menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap SAP berkontribusi konkret pada mutu laporan anggaran pemerintah daerah. Maka dari itu, kajian dari (Bestari & Wahyuni, 2023) memberikan perspektif berbeda, dengan menyimpulkan bahwa pengaruh penguasaan SAP terhadap kualitas laporan keuangan lebih terlihat atas level pemerintahan provinsi dibandingkan pada level kabupaten atau kota.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Teori keagenan memiliki peran sentral dalam menjelaskan hubungan antara pemilik sumber daya (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang untuk mengelolanya (agen). Konsep ini tidak hanya relevan di sektor privat, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam konteks sektor publik, termasuk dalam pemerintahan

daerah, di mana masyarakat berperan sebagai prinsipal. Sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agen dalam pengelolaan sumber daya publik. Hidayat (2021:75-80) menjelaskan bahwa teori keagenan berakar pada adanya ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal, yang dapat mengarah pada tindakan agen yang tidak selalu selaras dengan kepentingan prinsipal. Dalam konteks ini, ketika pemerintah daerah gagal mempresentasikan kepentingan masyarakat secara optimal, maka timbul biaya keagenan. Untuk mengurangi potensi konflik yang disebabkan perbedaan tujuan dan informasi tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian, termasuk pengeluaran biaya tertentu guna menjaga akuntabilitas dan menyelaraskan kepentingan antara kedua belah pihak.

Good Governance

Tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara optimal, pemerintah daerah cenderung mampu mengeluarkan laporan finansial yang tambah normatif, mampu dipercaya, dan seiring dengan prinsip pelaporan yang akuntabel (Sipahutar et al., 2025). Kondisi ini, pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja sosial dan ekonomi daerah secara menyeluruh. Menurut (World Bank, 2020) prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi merupakan pilar utama dalam melaksanakan *good governance*. Penerapan prinsip-prinsip ini bukan hanya berimbas ke pengoptimalan laporan anggaran pemerintah daerah, tetapi dapat diaplikasikan sebagai indeks kinerja dalam menilai keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, *good governance* berfungsi sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Penjabaran dan interpretasi informasi dalam sektor publik dapat dicapai melalui implementasi akuntansi manajemen keuangan, akuntansi, serta audit pada lembaga pemerintahan. Ketiga instrumen tersebut berperan krusial dalam mendukung terwujudnya *good governance* dengan berlandaskan pada standar pengetahuan yang sistematis dan akurat (Purwanti, 2022). Satu di antara sekian menjadi konkret dari berhasil tidaknya kebijakan pemerintah yang dilaksanakan, yaitu adanya warga yang sepakat dan turut terjun secara langsung dalam penentuan dan realisasi kebijakan suatu negara (Munawaroh et al., 2025). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor strategis dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan serta aspirasi publik (Pattiasina et al., 2022).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

(Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005, 2005) menetapkan akan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah acuan normatif yang wajib dipatuhi dalam penyusunan laporan anggaran di kawasan pemerintahan, baik di tingkat sentral maupun wilayah. Kebermanfaatan informasi mencerminkan bahwa laporan anggaran telah memenuhi kriteria sebagai informasi yang bermutu dan tepat bagi penggunaannya (Putra, 2025). SAP disusun untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menekankan kaidah transparansi, akuntabilitas, serta

efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara (Hida et al., 2024). Oleh karena itu, pengawasan atas pelaksanaan anggaran perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur di seluruh jenjang pemerintahan sebagai bagian dari upaya menjamin pengelolaan keuangan publik yang aman dan bertanggung jawab (Stirilita & Andayani, 2021).

Berdasarkan (Satya, 2023), pemahaman terhadap SAP dapat diukur melalui sejumlah indikator utama yang mencerminkan tingkat literasi akuntansi pemerintahan pada aparatur pemerintah daerah. Indikator-indikator tersebut mencakup : (1) pemahaman terhadap regulasi yang mengatur sistem akuntansi pemerintahan, (2) penguasaan atas asas-asas dasar dalam akuntansi sektor publik, dan (3) keterlibatan dalam pelatihan atau penyuluhan terkait SAP. Dengan demikian, ketiga indikator ini dapat digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi sejauh mana kapasitas individu khususnya aparatur pemerintah daerah berkontribusi dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan secara efektif juga efisien.

Kualitas Laporan Keuangan

Ibrahim (2022:70-75) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung akan sejauh mana laporan tersebut mampu mempresentasikan informasi yang berkaitan dan berguna dalam mendukung proses penetapan keputusan serta dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik kepada pihak terkait. Laporan keuangan juga dipergunakan untuk memastikan nilai sumber daya keuangan yang digunakan dalam menjalankan peran pemerintahan, mengevaluasi status ekonomi, mengukur efektivitas dan efisiensi unit pelapor, serta memutuskan kepatuhan pada aturan perundang-undangan (Yasis, 2024). Laporan keuangan ialah fasilitator yang dipergunakan untuk memprediksi prestasi kerja dan pengoperasian fungsi pertanggungjawaban di salah satu entitas (Rizky Ramadhan, 2024). Oleh sebab itu, berdasarkan perspektif informasi, laporan keuangan yang berkualitas dituntut untuk menyanggupi karakteristik kualitatif utama, antara lain relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan andal. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi alat strategis dalam proses pengambilan kebijakan berbasis data dan akuntabilitas fiskal (Kusumawati et al., 2024). Penyajian informasi yang tepat dan akurat dalam laporan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan keputusan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik (Handayani et al., 2025).

Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teori keagenan menjadi dasar konseptual dalam menjelaskan dinamika hubungan antara berbagai faktor dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam konteks penerapan *good governance* dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Teori ini menyoroti pentingnya pengurangan asimetri informasi antara pihak pengelola keuangan (agen) dan pemilik kepentingan publik (prinsipal) melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ketika prinsip-prinsip *good governance*

diterapkan konsisten, seperti keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan partisipasi publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah dapat meningkat. Penelitian oleh (Yuntina & Arifin, 2024) mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan *good governance*.

H₁: Penerapan *good governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap mutu laporan keuangan.

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Sektor Publik (SAP) terlibat dalam menjamin kesesuaian laporan keuangan dengan aturan akuntansi sektor publik yang diakui secara nasional. Tingkat pemahaman instansi pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat menentukan dalam menyajikan laporan keuangan yang tepat, transparan, serta dapat dipercaya. (Lantu et al., 2023) menemukan bahwa pemahaman dan implementasi SAP yang konsisten berperan serta secara konsisten memiliki kontribusi signifikan terhadap penambahan mutu laporan keuangan pemerintah daerah, karena mengakomodasi dalam teknik pencatatan, pelaporan, dan penyajian informasi keuangan secara tepat.

H₂: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dalam teori keagenan, tidak semua pemerintah daerah menjalankan praktik pelaporan keuangan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat sebagai prinsipal (Aminy et al., 2021). Maka dari itu, laporan keuangan pemerintah daerah menguasai peran strategis dalam menyediakan informasi yang andal untuk menilai kinerja keuangan dan mendorong akuntabilitas publik.

Dengan mempraktikkan prinsip *good governance* secara menyeluruh dan memperkuat tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap ketentuan yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah daerah mampu menyusun laporan finansial yang lebih bermutu. Hal ini diperkuat oleh temuan (Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, 2024) yang menunjukkan bahwa kombinasi antara *good governance* dan pemahaman akan SAP secara signifikan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat serta kredibilitas laporan keuangan daerah. Dari uraian tersebut, dapat disusun kerangka pemikiran seperti berikut.

H₃: Penerapan *good governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi yang dilakukan yakni pendekatan kuantitatif. Kajian ini berupa data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Kegiatan penelitian dan pengumpulan data pada studi ini dilaksanakan di lokasi Kabupaten Karawang. Adapun pelaksanaan penelitian berlangsung dalam rentang waktu Oktober 2024 sampai dengan Mei 2025. Instrumen angket yang digunakan dalam studi ini yakni jenis angket tertutup, di mana responden diminta menjawab beberapa dari butir soal yang sejalan dengan pilihan yang telah ditentukan sebelumnya dalam format yang telah disediakan. Populasi penelitian difokuskan pada instansi yang bertugas di bagian akuntansi dan keuangan dari 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Karawang, dengan total sebanyak 44 informan. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah metode sampling jenuh, yakni seluruh anggota populasi diikutsertakan sebagai sampel karena totalnya relatif terbatas. Namun, analisis parametrik seperti regresi linear berganda memerlukan data dalam bentuk skala rasio atau interval, sehingga diperlukan cara untuk mengonversi dari data skala ordinal ke skala interval. Metode Interval berurutan (MSI) digunakan untuk memenuhi syarat tersebut. Sumber data dari kajian ini ialah skor dari masing-masing indikator variabel dalam setiap butir soal yang didapat dari pengisian kuesioner, juga telah dialokasikan ke bagian akuntansi dan bagian keuangan yang bekerja di 22 SKPD Kabupaten Karawang sebagai responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif diterapkan untuk mengetahui pemahaman menyeluruh terkait tanggapan informan pada setiap indikator variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, indikator penerapan *good governance* terhadap partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi menunjukkan kriteria nilai sebesar 56,68% yang di mana dalam rentang penilaian yaitu cukup baik. Hal ini menerangkan bahwa dominan dari informan masih perlu meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam perancangan laporan keuangan. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap indikator yaitu pemahaman tentang regulasi dan peraturan akuntansi pemerintahan, pemahaman prinsip dasar akuntansi pemerintahan, dan pelatihan serta sosialisasi SAP memperoleh kriteria persentase sebesar 52,05% yang berarti cukup baik. Hal ini menggambarkan bahwa pegawai instansi pemerintah daerah Kabupaten Karawang cukup memiliki penguasaan atas SAP, namun masih diperuntukkan untuk lebih ditingkatkan lagi. Sementara itu, kualitas laporan keuangan dengan indikator relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami menghasilkan kriteria penilaian 55,57% yaitu cukup baik. Hal ini menunjukkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan masih perlu diperbaiki dan dioptimalkan lebih baik lagi.

Hasil Uji Analisis Data

Hasil Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2020:156) uji validitas ialah memperkirakan sejauh mana instrumen penelitian mampu secara presisi menguji variabel yang diteliti. Instrumen akan dinyatakan valid apabila hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil uji validitas untuk ketiga variabel Penerapan *Good Governance*, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan. Nilai r_{tabel} diperoleh berdasarkan rumus korelasi *product moment*, oleh derajat kebebasan (*degree of freedom*) dihitung memakai rumus $N-2$, di mana N ialah total sampel. Mengenai hal ini, total sampel sebanyak 44 responden menghasilkan df sebesar 42 ($44-2$), sehingga r_{tabel} yang digunakan 0,304. Dari hasil perhitungan, seluruh nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan r_{tabel} . Oleh sebab itu, ditarik kesimpulan jika keseluruhan poin pertanyaan dalam kuesioner pada variabel Penerapan *Good Governance*, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Kualitas Laporan Keuangan memenuhi syarat validitas, sehingga dikatakan valid dan pantas dipergunakan dalam studi ini.

Hasil Uji Reliabilitas

Sugiyono (2020:185), uji reliabilitas dipraktikkan guna memahami tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data yang stabil apabila digunakan berulang kali pada objek yang sama. Instrumen dinyatakan reliabel apabila hasilnya konsisten. Adapun perolehan uji reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Variabel	Butir Soal	Cronbach's Alpha
Penerapan <i>Good Governance</i>	10	0.750
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	6	0.715
Kualitas Laporan Keuangan	8	0.727

Sumber: Hasil *Output* SPSS IBM 27 (2025)

Nilai r sebesar 0,304 diperoleh dari analisis *product moment* dengan derajat kebebasan $df = N - 2$, di mana N ialah total sampel yang digunakan. Dengan jumlah responden sebanyak 44 orang, nilai df menjadi 42, sehingga nilai r menjadi 0,304. Nilai r ini lebih tinggi daripada nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan, hal ini menandakan bahwa semua butir soal yang termuat dalam kuesioner valid untuk menilai variabel kualitas laporan keuangan, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah, dan penerapan *good governance*. Selanjutnya, hasil dari uji reliabilitas membuktikan jika seluruh variabel mempunyai nilai *cronbach's alpha* di atas 0,70. Ini berarti bahwa instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan *good governance*, pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintah, dan kualitas laporan keuangan sangat dapat diandalkan.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Sugiyono (2020:234), uji normalitas bermaksud untuk memahami apakah data terkelola normal atau tidak. Uji ini krusial, agar uraian statistik tidak bias akibat pelanggaran asumsi normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan memakai metode *Shapiro Wilk*. Berikut uji normalitas dari studi ini yaitu:

Tabel 2. Uji Normalitas *Shapiro Wilk*

Tests of Normality <i>Shapiro Wilk</i>	
Variables	Sig.
Penerapan <i>Good Governance</i>	0.237
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	0.192
Kualitas Laporan Keuangan	0.208

Sumber: Hasil *Output* SPSS IBM 27 (2025)

Perolehan uji normalitas ini menampilkan bahwa penerapan prinsip *good governance*, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan, serta kualitas laporan keuangan masing-masing memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa data dalam studi ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bermaksud guna mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam regresi, yang dapat menimbulkan distorsi dalam estimasi koefisien (Sugiyono, 2020:78). Berikut hasil uji multikolineritas:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	Penerapan <i>Good Governance</i>	0.559	1.789
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	0.559	1.789
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan			

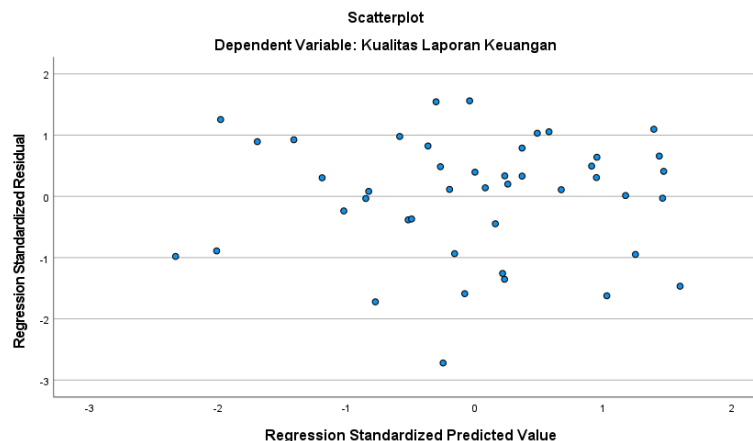
Sumber: Hasil *Output* SPSS IBM 27 (2025)

Hasil uji multikolinearitas menyatakan bahwa nilai toleransi untuk setiap variabel adalah 0,559, yang melebihi 0,1. Begitu pula, nilai variasi faktor inflasi untuk ketiga variabel juga sama yaitu 1,789 dan totalnya berada di bawah 10. Dengan demikian, bisa diperoleh kesimpulan jika tiada terdeteksi multikolinearitas atau hubungan yang kuat antar variabel independen.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Sugiyono (2020:27), uji heterokedastisitas dipergunakan demi mengamati apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau tidak. Pengujian ini penting dipraktikkan guna memastikan bahwa model regresi tidak mengalami

pelanggaran asumsi klasik yang dapat memengaruhi validitas estimasi. Ini adalah hasil uji heterokedastisitas :



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Hasil *Output SPSS IBM 27*

Berdasarkan *output Scatterplot*, penyebaran titik-titik data tampak acak dan tidak membentuk pola yang jelas, dengan distribusi yang relatif seimbang di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y. Pola tersebut menandakan bahwa model yang regresi yang diterapkan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual dapat dianggap konstan atau bersifat homogen.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2020:213), analisis regresi linear berganda dikerjakan demi memprediksi nilai variabel dependen dengan mempertimbangkan pengaruh secara simultan dari dua atau lebih variabel independen. Di bawah ini adalah hasil dari analisis regresi linear berganda :

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	3.811	2.379
	Penerapan <i>Good Governance</i>	0.411	0.107
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	0.462	0.155

Sumber: Hasil *Output SPSS IBM 27* (2025)

Beralaskan data di atas, dapat dijadikan persamaan regresi linear berganda dalam kajian ini yaitu:

$$\text{Kualitas Laporan Keuangan} = 3,811 + 0,411X_1 + 0,462X_2$$

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3,811 mengindikasikan bahwa jika variabel Penerapan *Good Governance* (X_1) dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) bernilai nol, sehingga Kualitas Laporan Keuangan (Y) diperkirakan sebesar 3,811. Koefisien X_1 sebesar 0,411 menandakan pengaruh positif. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam Penerapan *Good Governance* akan menaikkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,411 dengan anggapan variabel lain tetap. Koefisien X_2 sebesar 0,462 juga menunjukkan hubungan positif. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan, setiap peningkatan satu satuan dalam variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan diperkirakan akan menyampaikan keterlibatan pada Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,462.

Hasil Analisis Korelasi *Pearson*

Sugiyono (2020:180), analisis korelasi *pearson* diperoleh nilai r dengan menggunakan metode *pearson product moment* dengan cakupan bobot antara -1 batas +1. Semakin mendekati angka +1, maka ikatan antar variabel bertambah kuat. Sementara itu, tanda positif atau negatif mengindikasikan arah hubungan, apakah searah atau berlawanan. Hasil pengolahan data dari analisis ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. Analisis Korelasi *Pearson*

Model	Pearson Correlation
Penerapan <i>Good Governance</i>	1
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	.664**
Kualitas Laporan Keuangan	.740**

Sumber: Hasil *Output* SPSS IBM 27 (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance* memiliki korelasi kuat dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai $r = 0,740$, yang menunjukkan signifikansi hubungan tersebut. Sementara itu, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan juga menunjukkan hubungan yang kuat dan positif dengan $r = 0,704$. Kedua variabel tersebut secara simultan menandakan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil Koefisien Determinan (R_2)

Sugiyono (2020:257), pada intinya analisis koefisien determinan ialah untuk menaksir kemampuan sedalam apa kualifikasi model dalam memaparkan variasi variabel dependen. Dalam studi ini, hasil uji koefisien determinan dibantu oleh *software* IBM SPSS 27, tabel dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Koefisien Determinan (R_2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	0.628	0.610	2.663

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan <i>Good Governance</i>				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan				

Sumber: Hasil *Output* SPSS IBM 27 (2025)

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,628 yang berarti Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berkontribusi sebesar 62,8% terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Adapun sisanya, yaitu 37,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang dianalisis dalam studi ini.

Uji Hipotesis

Hasil Uji T (Parsial)

Menurut Sugiyono (2020:206), uji T secara parsial digunakan guna menyelidiki pengaruh satu per satu variabel independen secara sebagian pada variabel dependen. Di pengujian ini, uji t akan menguji apakah Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Adapun hasil uji T secara parsial:

Tabel 7. Uji T

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.602	0.117
	Penerapan <i>Good Governance</i>	3.823	0.000
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	2.985	0.005
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan			

Sumber: Hasil *Output* SPSS IBM 27 (2025)

Berlandaskan tabel di atas, hasil uji t menampilkan bahwa Penerapan *Good Governance* memiliki nilai t_{hitung} 3,823 > t_{tabel} 2,018 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang mengandung maksud variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Demikian pula, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan t_{hitung} 2,985 > t_{tabel} 2,018 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga juga berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil Uji F (Simultan)

Ghozali (2021:82), uji F diterapkan demi menguji seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji f (simultan):

Tabel 8. Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	34.595	.000 ^b
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan		
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan <i>Good Governance</i>		

Sumber: Hasil *Output* SPSS IBM 27 (2025)

Hasil uji F memperlihatkan bahwa nilai F_{hitung} yang mencapai 34,595 melebihi nilai F_{tabel} yang berada di angka 3,23, dan nilai signifikansi yang tercantum sebesar 0,000 jauh di bawah level signifikansi 0,05. Ini menandakan bahwa penerapan tata kelola yang baik dan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan secara bersamaan menyandang pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pembahasan Hasil

Temuan Penerapan *Good Governance* pada Kualitas Laporan Keuangan

Dalam perspektif konsep teori keagenan, penerapan *good governance* dipandang sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tata kelola serta memastikan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak selaras dengan kepentingan masyarakat sebagai pihak prinsipal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kepentingan publik dan pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan bersama. Penerapan *Good Governance* berdampak positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,823 > 2,018$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi adalah $0,000 < 0,05$. Studi yang dilaksanakan (Istiqomah Shinta Philadelphiah Sri Suryaningsum Sriyono, 2020) mengutarakan akan penerapan prinsip *good governance* mendistribusikan dampak positif pada kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat implementasi prinsip tata kelola yang baik, maka kian meningkat pula mutu laporan finansial yang ditimbulkan oleh pemerintah daerah.

Temuan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan

Riset tersebut menemukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyampaikan asas teoritis dalam pengolahan dan pemaparan laporan anggaran untuk instansi pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71, 2010). Beralaskan hasil pengujian *statistic* (Uji T) yang sudah dilakukan maka hasil yang didapat yaitu nilai t_{hitung} sebesar 5,051 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,018. Maka $2,985 > 2,018$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi adalah $0,001 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dari itu, dapat ditarik Kesimpulan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan SAP di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ketepatan dalam penyajian laporan keuangan, tetapi juga turut

menopang keterbukaan dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan publik, Penelitian terdahulu (Ikriyati & Aprila, 2019; Rohmah et al., 2020; Atiningsih, 2020) menunjukkan bahwa pemahaman serta penerapan SAP dapat meningkatkan mutu laporan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi akuntansi pemerintah pada aparatur negara, semakin optimal pula mutu laporan keuangan yang disajikan.

Temuan Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis kajian yang mengatakan bahwa Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini tersebut ditunjukkan dengan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $34.595 > 3,23$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan Tingkat signifikansi sebesar $< 0,000$, yang berarti jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan begitu dikonklusikan bahwa Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan daerah yang bermutu tinggi ditandai oleh relevan, dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan andal (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 77, 2020). Dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selaras dengan standar yang ditetapkan, penyajian informasi keuangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, praktik akuntansi sektor publik, dan prinsip penyajian informasi yang berkualitas. Penelitian sebelumnya (Rahmadani & Zulaika, 2023; Agus Siahaya, 2022) mengonfirmasi bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sangat dipengaruhi oleh daya guna manajemen keuangan serta tingkat pemahaman SAP. Oleh karena itu, perbaikan laporan keuangan di sektor publik khususnya diperoleh melalui peningkatan standar akuntansi sektor pemerintahan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntansi pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan hasil analisis uji bertahap ini, telah menghasilkan beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Governance* secara umum, memperoleh tingkat kepuasan sebesar 56,68%. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, terutama dalam hal pengelolaan laporan keuangan yang cenderung dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok
2. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan tergolong cukup baik dengan tingkat kepuasan mencapai 52,05%. Kendati demikian, sebagian pegawai masih mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan penyusunan laporan keuangan secara mandiri, meskipun telah mengikuti pelatihan maupun kegiatan sosialisasi terkait SAP.

3. Kualitas Laporan keuangan juga dinilai cukup memadai, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat kepuasan sebesar 55,57%. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa laporan yang belum disertai penjelasan yang memadai, sehingga menyulitkan pemahaman terhadap isi laporan keuangan tersebut.
4. Berdasarkan hasil analisis, Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial terbukti mempunyai dampak yang signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengujian yang menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a).
5. Secara simultan kedua variabel independen, Penerapan *Good Governance* dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan terbukti memegang pengaruh secara signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan, sebagaimana dibuktikan dengan nilai uji F sebesar 34.595, maka $34.595 > 3,23$ atau ($f_{hitung} > f_{tabel}$), yang memperkuat penolakan terhadap H_0 dan penerimaan H_a .

Melalui pengembangan skema tata kelola yang efektif, disarankan pada pemerintah daerah setempat untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, diharapkan prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan dan dimaksimalkan guna menguatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Meskipun sebagian besar karyawan pemerintah daerah telah memiliki pemahaman terhadap SAP, masih diperlukan program pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan dalam memperdalam kompetensi teknis di bidang akuntansi sektor publik. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar elemen-elemen tambahan yang mungkin berpengaruh pada variabel yang diteliti, tetapi tidak dibahas dalam studi ini, dapat dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang serupa. Selain itu, selanjutnya dianjurkan untuk memperkaya landasan teori dan kerangka konseptual dengan referensi yang lebih beragam, agar dapat meningkatkan kekuatan argumen teoritis dan validitas penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Advia, R., Wibowo, A. S., & Diarsyad, M. I. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya). *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.52300/blnc.v14i1.8552>
- Agus Siahaya, S. P. S. (2022). *The Effect of Good Governance Implementation, Governmen Accounting Standards, Effectiveness of Internal Control System and Human Resource Quality on the Quality of Regional Task Force Financial Statement*. 20(1), 105–123.
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147.

- Bank, W. (2020). *The World Bank Annual Report: Supporting Countries in Unprecedented Times*. World Bank. <https://hdl.handle.net/10986/34406>
- Bestari, K. A., & Wahyuni, F. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 163–184.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
- Dzaky, V., & Putra, C. (2020). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung*. 17(1), 46–65.
- Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, N. R. (2024). *The Influence of Good Governance and Government Accounting Standards On The Quality of Local Government Financial Reports in Kab. Mojokerto Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 7, 514–526.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (cetakan x). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S., Sabrina, S. V., Ramadani, M., Anggraeni, V., Sari, N., Supraja, G., & Program, A. S. (2025). The Role Of Government Accounting Standards On The Quality Of Regional Financial Reports. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 3(2), 434–441.
- Hartikayanti, H. N. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi*. October 2015.
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). *Effect Of Village Apparatus Performance , Internal Control , Information Technology Utilization On Village Fund Accountability And Implications On*. 2(4), 569–580.
- Hermawan, A. R. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Periode 2017-2020. *HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA*, 2(2), 304–315.
- Hida, R., Utami, S., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah , Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *JURNAL MANEKSI VOL*, 13(2), 265–273.
- Hidayat, A. (2021). *Manajemen Keuangan : Teori dan Praktik*. Andi.
- Ibrahim, M. (2022). *Akuntansi Pemerintahan : Teori & Praktik*. Salemba Empat.
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian

- Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140.
- Kusumawati, A., Makassar, U. M., & Hasanuddin, U. (2024). THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS AND THE QUALITY OF. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 13(1), 256–261.
- Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(1), 91–97.
- Mukaromah, L., & Ari, P. (2021). Pengaruh Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas). *Jurnal Sebi*, 4(02), 134–140.
- Munawaroh, S., Purwanto, S. A., Ganie, D., & Correia, C. C. (2025). Improving Financial Report Quality Through Good Governance and Government Accounting Standards in Berau Regency. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(1), 1–19.
- Negeri, M. D. (2020). *Permendagri No.77 Tahun 2020*.
- Pattiasina, V., Noch, M. Y., Rumasukun, M. R., Seralurin, Y. C., Tamaela, E. Y., Papua, U. Y., Papua, U. C., Tinggi, S., Administrasi, I., & Perintah, S. (2022). Moderating Effect of Good Governance on Determinants of the Quality Region Government Financial Reports. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3019–3033.
- Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *Fokusmedia*, Juni, 1–2.
- Purwanti, A. (2022). Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(2).
- Putra, G. H. (2025). Analysis of the Impact of the Implementation of Government Accounting Standards and the Use of Budget on the Performance Accountability of Government Institutions. *Journal of Applied Science and Engineering Management Research*, 1(1), 19–28.
- Rahmadani, P. D., & Zulaika, N. (2023). Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 163–170.
- Rizky Ramadhan, U. F. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*

(*Jebma*), 04(01), 229–247.

- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 9(5), 43–51.
- Satya, V. E. (2023). The Implementation of Accrual Base Government Accounting System in West Java Province. *Kajian*, 25(2), 145–160.
- Sipahutar, S. R., Fadilla, N., Nadapdap, R. H., Nabila, S., & Supraja, G. (2025). The Effect of Transparency And Accountability on The Quality of Public Financial Reports. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 1–7.
- Stirilita, F. A., & Andayani. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–16.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafaah, A., & Baroroh, N. (2023). Pengujian Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Pemoderasi. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa Vol*, 11(2), 205–216.
- Yasis, U. (2024). Influence of Government Accounting Standards , Systems Internal Control , Regulatory Compliance Legislation on Quality Financial Statements. *International Journal of Science and Society*, 6(1), 235–254.
- Yuntina, S. S., & Arifin, A. (2024). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi , Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 5(2), 859–871.